

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cahyadi, Amelia, Zainal Muttaqin, dan Anindya, 2023, *Hukum Pengawasan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Data dan Analisis Tempo, 2022, *Perjalanan Komisi Ombudsman*, Tempo Publishing, Jakarta.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo, Surabaya.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi, 2011, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, UB Press, Malang.
- Hayat, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*, Rajawali Pers, Depok.
- Masthuri, Budhi, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nurchotimah, Aulia Sholichah Iman, 2021, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Jejak Pustaka, Yogyakarta.
- Podungge, Abdul Madjid, 2024, *Ombudsman: Kewenangan dan Kekuatan Putusan Ajudikasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triantono dan Yuni Kurniasih, 2022, *Dinamika Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI)*, Pustaka Rumah C1nta, Magelang.

### Artikel Jurnal

Firmansyah, Didi, dan Sigit Nugroho, “Tinjauan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat”, *Progresif*, Vol. 17, No. 2, Desember 2023.

Lestari, Ratna Ani, dan S. Agus Santoso, “Pelayanan Publik dalam *Good Governance*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Nabil, Muhammad Mujab, Zahran Qobi Salim, Antasena Yudha Pratama, Hadrian Satria Putra, “Perlindungan Konstitusional State Auxiliary Agencies Berbasis Independent Regulatory Agencies (IRAS) Guna Mewujudkan Kredibilitas Pelayanan Negara Secara Demokratis dalam Perspektif Check and Balances”, *Aktivisme*, Vol. 1, No. 3, Juli 2024.

Noviana, “Persandingan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ombudsman Perwakilan Daerah Provinsi”, *Perspektif*, Vol. 26, No.1, Januari 2021.

Peso, Hendrikus Deo, dan Edi Pranoto, “Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Juristic*, Vol. 3, No. 1, April 2022.

Susanto, Rudy, dan Indah Pangesti, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta”, *Journal of Applied Business and Economic*, Vol. 5, No. 4, Juni 2019.

Yunita, Ita, Fia BIRTHA, dan Al Sabet, “Konsep Pengendalian Internal sebagai Upaya Meminimalisir Tagihan Biaya Pendidikan pada Sekolah Swasta”, *Al Qodri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan*, Vol. 18, No. 3, Januari 2021.

### Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Agnes Krisara Mp, 2020, *Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY dalam Menindaklanjuti Laporan Mengenai Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN dengan Jalur Zonasi Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jaya, Muchtar, 2023, *Pelaksanaan Tugas Ombudsman Kota Makassar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Razak Ramadhani, 2023, *Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman dalam Menindaklanjuti Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Tiska Amalia Hardini, 2023, *Kepatuhan Terlapor dalam Pelaksanaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Terkait Tindakan Maladministrasi*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

### Internet

Alhamidi, Rifat, “PSI: 324 Ijazah di Jabar Ditahan Sekolah, Mayoritas SMA/SMK”, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7111425/psi-324-ijazah-di-jabar-ditahan-sekolah-mayoritas-sma-smk>, diakses 6 November 2024.

Nurhaliza, Siti, “Dinas Pendidikan DKI Telusuri Sekolah Terkait Penahanan Ijazah”, <https://www.antaraneews.com/berita/3753870/dinas-pendidikan-dki-telusuri-sekolah-terkait-penahanan-ijazah>, diakses 6 November 2024.

Ombudsman RI, “Perwakilan”, <https://ombudsman.go.id/perwakilan>, diakses 1 November 2024.

Pemerintah Kota Kediri, “Tanggapi Ijazah Ditahan Sekolah, Wali Kota Kediri Tegaskan Tidak Boleh Ada Diskriminasi dalam Pendidikan”, <https://kedirikota.go.id/p/berita/10110340/tanggapi-ijazah-ditahan-sekolah-wali-kota-kediri-tegaskan-tidak-boleh-ada-diskriminasi-dalam-pendidikan>, diakses 7 November 2024.

Pangarobowo, Wisang Seto, “Ratusan Ijazah di DIY Ditahan Sekolah, Ombudsman: Laporan Paling Lengkap dan Masif”, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/10/30/162102278/ratusan-ijazah-di-diy-ditahan-sekolah-ombudsman-laporan-paling-lengkap>, diakses 9 November 2024.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DIY, “Catatan Akhir Tahun; Pelayanan Publik di DIY dalam Bayang-Bayang Fraud, Pungli dan Pengabaian Kewajiban”, <https://bit.ly/oridiy2024>, diakses 1 September 2024.

PEW, Eleonora, dan Muhammad Ilham Baktora, “Dugaan Ribuan Ijazah Siswa di Jogja Ditahan, Begini Kata Kepala Sekolah di SMK”, <https://jogja.suara.com/read/2021/11/10/192000/dugaan-ribuan-ijazah-siswa-di-jogja-ditahan-begini-kata-kepala-sekolah-di-smk>, diakses 8 November 2024.

Pradana, Widi RH, “1.546 Ijazah Siswa SMA/SMK Swasta di DIY yang Ditahan Sekolah Ditebus Pemda DIY”, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/1-546-ijazah-siswa-sma-smk-swasta-di-diy-yang-ditahan-sekolah-ditebus-pemda-diy-1zIud4WLYLZ/full>, diakses 7 November 2024.

Purnandaru, Arfiansyah Panji, “Kasus 278 Ijazah SMP-SMA-SMK di DIY Ditahan, Diadukan ke ORI DIY”, <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-278-ijazah-smp-sma-smk-di-diy-ditahan-diadukan-ke-ori-diy-23of0NtXhPE/full>, diakses 9 November 2024.

Salman, Ghinan, “Tebus Ijazah 729 Pelajar yang Tunggak SPP, Wali Kota Surabaya: Itu Tanggung Jawab Pemerintah”, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/06/15/124439178/tebus-ijazah-729-pelajar-yang-tunggak-spp-wali-kota-surabaya-itu-tanggung>, diakses 7 November 2024.

Saputra, Tommy, “Ijazah Siswa SMA 5 Bandar Lampung Ditahan Sekolah karena Belum Lunasi Komite”, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6728453/ijazah-siswi-sma-5-bandar-lampung-ditahan-sekolah-karena-belum-lunasi-komite>, diakses 8 November 2024.

Subarkah, Lugas, “Kasus Penahanan Ijazah di DIY Capai Ratusan, Sejumlah Lembaga Buka Pengaduan”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/06/25/510/1000957/kasus-penahanan-ijazah-di-diy-capai-ratusan-sejumlah-lembaga-buka-pengaduan>, diakses 8 November 2024.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Ombudsman Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional
- Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 *jo.* Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan
- Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri
- Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman RI
- Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
- Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Konsultasi, Penerimaan, dan Verifikasi Laporan

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnahan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman RI

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 344 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 37 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman RI

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 156 Tahun 2024 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Ombudsman RI

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 194 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman RI

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus pada 12 Agustus 2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 421K/TUN/KI/2024 perihal keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Banten Nomor 069/VII/KI-BANTEN-PS/2023 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 8/G/KI/2024/PTUN.Srg yang diputus pada 16 Juli 2024

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Tte perihal gugatan atas ketidakcermatan pemeriksaan di Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara sehingga menimbulkan kerugian yang diputus pada 11 April 2022

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 82/G/TF/2023/PTUN/Smg perihal perbuatan melawan hukum berupa tidak menindaklanjuti laporan masyarakat yang diputus pada 13 Desember 2023

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 8/G/KI/2024/PTUN.Srg perihal keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Banten Nomor 069/VII/KI-BANTEN-PS/2023 yang diputus pada 25 Maret 2024

Putusan Komisi Informasi Banten Nomor 069/VII/KI-BANTEN-PS/2023 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai keterbukaan informasi di lingkungan Perwakilan Ombudsman RI Banten yang diputus pada 18 Desember 2023

### **Lainnya**

Hasil Wawancara dengan Asisten Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman RI DIY, Rifki Taufiqurrahman, pada Hari Selasa 7 Januari 2025

Hasil Wawancara dengan Asisten Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman RI DIY, Rifki Taufiqurrahman, pada Hari Senin 24 Februari 2025